

**LAPORAN KEGIATAN
KPU-BAWASLU PROBOLINGGO *TALK#1*
"MENJAWAB TANTANGAN PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK 2024"**



SEBAGAI PENGABDIAN MASYARAKAT

Oleh :

Imam Suchavo, S.IP., M.AP

NIDN: 0701018004

UNIVERSITAS PANCA MARGA

JUNI 2021

LEMBAR PENGESAHAN



UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Telp. (0335) 422715, 427923, Fax. (0335) 427923 Probolinggo 67271
Email: lppm@upm.ac.id – Website: <http://lppm.upm.ac.id/>

LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Suchahyo, S.IP., M.AP.
N I D N : 0701018004
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan
Unit Kerja : Universitas Panca Marga Probolinggo

Telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai **Pemateri**,

Pada Kegiatan : KPU-Bawaslu Probolinggo *Talk#1*; Menjawab Tantangan Pelaksanaan
Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024
Tanggal : Rabu/30 Juni 2021
Lama waktu : Satu hari
Tempat : Aula KPU Kota Probolinggo
Peserta : Akademisi, perwakilan organisasi kemasyarakatan, organisasi
keagamaan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan lain-lain.

Mengetahui
KCPM LPPM,

H. Wicakanto, S.E., M.M., CRA.
NIDN. 0711056805

Probolinggo, 05 Juli 2021
Pemateri,

Imam Suchahyo, S.IP., M.AP.
NIDN. 0701018004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allaah SWT., atas segenap kemurahanNYA maka saya dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui estafet kegiatan KPU-Bawaslu *Talk#1* yang dilaksanakan secara *hybrid* yakni melalui aplikasi *zoom meeting* dan luring yang bertempat di aula KPU Kota Probolinggo. Pangabdian pada masyarakat ini merupakan pemenuhan atas Tri Dharma Perguruan tinggi yang wajib dilaksanakan oleh civitas akademika, khususnya dosen.

Adapun kegiatan ini bertajuk; “Menjawab Tantangan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” yang telah terlaksana pada hari Rabu/30 Juni 2021. Materi diskusi dipilih berdasar kebutuhan akan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024 mendatang, khususnya dari aspek tantangan dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik secara kuantitas dan kualitas.

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan kepada;

1. Ketua KPU Kota dan Kabupaten Probolinggo,
2. Ketua Bawaslu Kota dan Kabupaten Probolinggo,
3. Perwakilan Perguruan Tinggi se Probolinggo,
4. Rekan-rekan mahasiswa,
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Akhir kata, mudah-mudahan segenap ikhtiar kita mendapatkan keberkahan dan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allaah SWT. Aamiin

Hormat Penulis,

Imam Sucahyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
1. LATAR BELAKANG	5
2. TUJUAN KEGIATAN	6
3. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN	6
4. SASARAN KEGIATAN	7
5. METODE YANG DIGUNAKAN	7
6. MEDIA YANG DIGUNAKAN	7
7. EVALUASI KEGIATAN	7
8. DOKUMENTASI	7
9. RINGKASAN ISI MATERI	8
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN-LAMPIRAN	13
SURAT TUGAS	13
DOKUMENTASI	14
SERTIFIKAT	15

LAPORAN KEGIATAN

DALAM RANGKA KPU-BAWASLU PROBOLINGGO *TALK#1* "MENJAWAB TANTANGAN PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024"

SEBAGAI PENGABDIAN MASYARAKAT

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini diinisiasi oleh KPU dan Bawaslu baik Kota dan Kabupaten Probolinggo dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Panca Marga, Zainul Hasan, Nurul Jadid, dan yang lainnya dengan tujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya Kota dan Kabupaten Probolinggo agar melek politik serta lebih dewasa dalam berdemokrasi, khususnya dalam setiap gelaran pesta demokrasi. Harapannya akan didapat peningkatan kuantitas dan kualitas dari hasil Pemilu dan Pemilihan itu sendiri, khususnya pada tahun 2024 mendatang. Gelaran perdana KPU-Bawaslu *Talk* ini dilaksanakan secara *hybrid* mengingat masih dalam suasana pandemi Covid 19. Kelebihannya, kegiatan ini bisa diikuti oleh peserta seantero nusantara melalui aplikasi *zoom meeting* dan langsung dimoderatori oleh Radfan Faisal selaku Komisioner KPU Kota Probolinggo. Namun demikian para pemateri, seperti Dekan FISIP Universitas Panca Marga; Imam Suchyo, Ketua KPU Kota Probolinggo; Ahmad Hudri, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo; Azam Fikri, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo; Lukman Hakim, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo; Fathul Qorib, dan sebagian kecil peserta perwakilan dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa berhasil dikumpulkan di aula kantor KPU Kota Probolinggo.

Kegiatan dialog disertai diskusi interaktif yang berlangsung kurang lebih selama dua jam tersebut mengusung tema; "Menjawab Tantangan Pelaksanaan Pemilu-Pemilihan Serentak 2024". Sekilas memang tidak ada yang istimewa, Namun justru pada gelaran pesta demokrasi periode mendatanglah tantangan baru mencuat ke permukaan, yakni dilaksanakannya pemilihan presiden, anggota dewan perwakilan rakyat seluruh tingkatan, anggota DPD serta pemilihan kepala daerah semua tingkatan secara serentak. Disinyalir akan ada banyak permasalahan yang akan muncul, lebih spesifik jika dikaitkan dengan Pemilu dan Pemilihan 2024 seperti, adanya pasal-pasal dalam UU Pemilu dan Pemilihan yang multitafsir sehingga membuat penyelenggara rentan dipersoalkan baik secara etik hingga pidana. Ada pula masalah

irisan tahapan antara Pemilu dan Pemilihan yang relatif berdekatan sehingga membutuhkan kesiapan yang benar-benar matang, dan sebagainya. Disamping itu, banyak pula permasalahan yang sudah-sudah yang disinyalir tetap akan muncul, seperti tingginya angka Golput, praktik *money politic*, semakin maraknya angka pelanggaran Pemilu, hingga fanatisme berlebih terhadap salah satu calon yang acap menimbulkan gesekan antar pendukung dan berujung pada pecahnya kerusuhan.

Fenomena demikian tentu merupakan tantangan tersendiri yang membutuhkan upaya pendewasaan dan sosialisasi sinambung serta ikhtiar-ikhtiar ekstra lainnya, bukan hanya dari penyelenggara dan pengawas Pemilu dan Pemilihan, melainkan oleh semua lini termasuk kalangan mahasiswa dan akademisi sebagai garda depan yang akan meneruskan hasil dari kegiatan dimaksud kepada masyarakat, khususnya yang memiliki hak pilih.

2. TUJUAN KEGIATAN

- A. Memberikan pencerahan dan peningkatan literasi politik, khususnya dalam hal Pemilu dan Pemilihan.
- B. Meningkatkan kualitas demokrasi dan upaya menghasilkan Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik dari sisi kuantitas dan kualitas.
- C. Memperkenalkan tantangan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- D. Memupuk silaturahmi dan mengisi kerjasama yang sudah terjalin antara FISIP UPM, KPU dan Bawaslu Kota Probolinggo serta mengajak pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap Pemilu dan Pemilihan 2024 dalam satu jalinan kolaborasi Bersama.

3. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu/30 Juni 2021 secara *hybrid* melalui aplikasi *zoom meeting* dan secara luring di aula kantor KPU Kota Probolinggo.

4. SASARAN KEGIATAN

Adapun sasaran diantaranya adalah seluruh masyarakat, khususnya yang memiliki hak pilih, kandidat yang hendak berkompetisi memperebutkan suara rakyat, tokoh masyarakat, tokoh organisasi keagamaan, kepemudaan, dan lainnya serta kalangan akademisi, seperti dosen hingga mahasiswa.

5. METODE YANG DIGUNAKAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berbentuk ceramah dan dialog interaktif atau diskusi tanya jawab antara pemateri dengan *audiens* baik yang hadir secara langsung ataupun yang tergabung dalam aplikasi *zoom meeting*.

6. MEDIA YANG DIGUNAKAN

Kegiatan ini menggunakan alat bantu berupa, *smartphone*, laptop, proyektor, layar, pengeras suara, meja dan kursi, dan sebagainya.

7. EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan ini terlaksana sesuai harapan dengan balutan kesederhanaan namun tidak mengurangi esensi pesan yang hendak disampaikan. Peserta baik yang hadir langsung dan daring sangat antusias mengikuti jalannya kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab. Namun sayangnya keterbatasan waktu membuat tidak semua pertanyaan dapat dijawab. Beberapa undangan di luar akademisi juga tidak tampak dikarenakan kesibukan masing-masing. Secara teknis beberapa *noise* muncul dari *storing* audio yang dipancarkan oleh pengeras suara yang berpadu dengan *smartphone* pemateri yang tidak menggunakan *headset*.

8. DOKUMENTASI

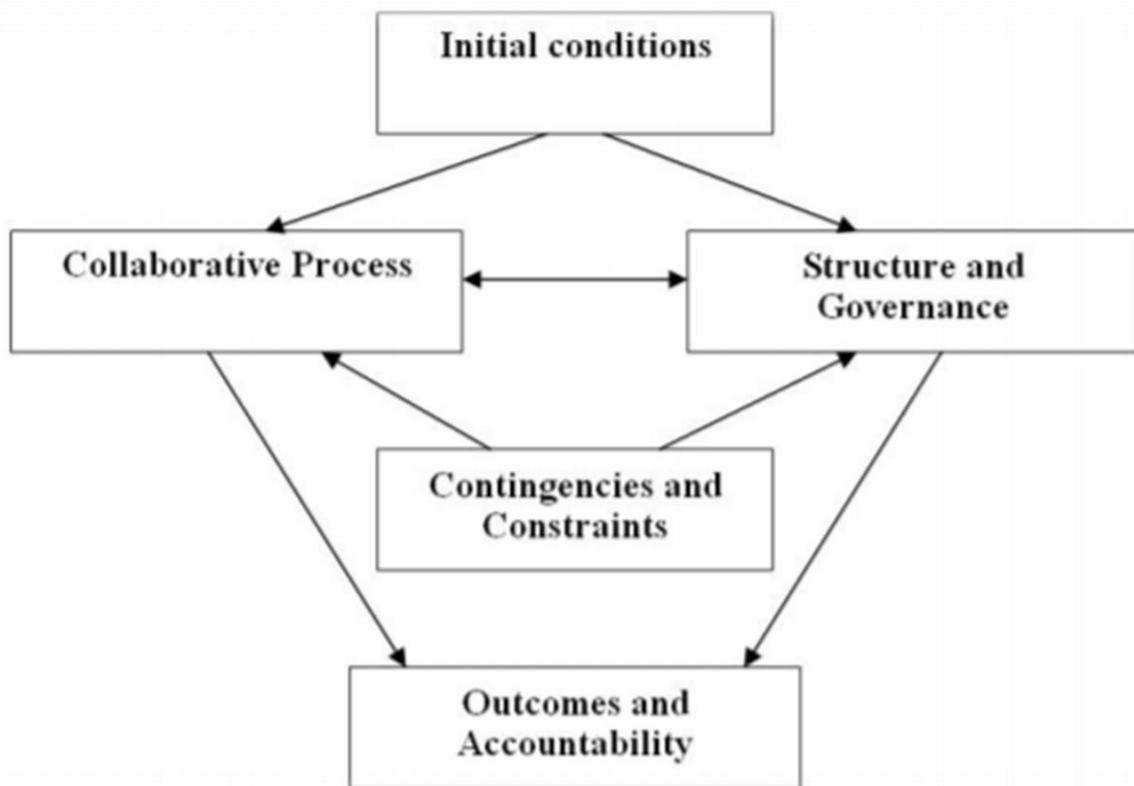
Beberapa dokumen kegiatan ini bisa dilihat pada foto pada halaman lampiran dan beberapa laman milik upm.ac.id, kota-probolinggo.kpu.go.id, probolingkokota.bawaslu.go.id, termasuk kanal *youtube* dan beberapa sosial media milik keduanya.

9. RINGKASAN MATERI

Menjawab Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 melalui *Cross Sector Collaborative Governance*

Sejatinya pelaksanaan Pemilu dan atau Pemilihan yang merupakan pesta demokrasi lima tahunan haruslah berjalan dengan baik, bahkan lebih baik dan lebih baik lagi sebagai agenda rutin yang pola-polanya sudah terpetakan sejak lama. Berjalannya Pemilu dan Pemilihan yang baik dimaksud setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas tentu hal ini berkaitan dengan jumlah pemilih yang sederhananya dapat dilihat dari banyaknya pemilih yang menyalurkan pilihannya di kotak suara, sedikitnya suara yang terbuang karena tidak sah, menurunnya angka Golput, dan sebagainya. Sedangkan dari aspek kualitas berkenaan dengan jalannya Pemilu dan Pemilihan dengan Luber dan Jurdil yang muaranya akan menghasilkan pemimpin dan perwakilan-perwakilan rakyat yang benar-benar merupakan representasi rakyat. Mewujudkan semuanya tentu bukan perkara mudah dan hanya mengandalkan pemerintah, melainkan semua pihak yang mengitarinya.

Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *governance*, dimana keterlibatan unsur stakeholder berarti melebur otoritas tunggal (*government*) ke berbagai domain dan aktor, yang memaksa negara (pemerintah) berbagi kekuasaan ke samping dengan *civil society* dan *private sector*, ke bawah dengan masyarakat lokal, dan ke atas dengan lembaga-lembaga trans-nasional (Rhodes, 2000). Jika demikian maka tidak mengherankan bila pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh KPU dan Bawaslu kemudian dituntut untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, tokoh Ormas, keagamaan hingga kalangan akademisi. Dalam istilah lainnya hal ini dikenal dengan *Cross Sector Collaborative Governance* yang mengandung arti; "*the process of facilitating and operating in multi-organizational arrangement to solve problems that cannot be solved, or solved easily by single organization*" (Agranoff & McGuire, 2003). Lebih jauh berkenaan dengan implementasi *Cross Sector Collaborative Governance* dimaksud maka harus memperhatikan hal-hal sebagaimana arahan kerangka kerja berikut.



Sumber: Bryson, Crosby and Stone (2006).

Bryson's framework for Cross-sector Collaboration

Dalam kerangka kerja tersebut, khususnya *initial conditions* maka harus memperhatikan; *general environment*, *failure*, dan *precondition*. Hal ini dapat dikaitkan dengan beberapa pertanyaan krusial seperti, apakah pada saat Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan masih dalam situasi pandemi ataukah tidak, pelaksanaan yang serentak dan irisan estafet Pemilu dan Pemilihan yang berdekatan sudah barang tentu akan menguras banyak energi. Bahkan pada Pemilu sebelumnya tanpa embel-embel serentak pun didapati banyak staf berguguran sebelum Pemilu benar-benar final. Pelaksanaan serentak juga akan menghasilkan kebingungan pemilih yang akan berujung pada tidak sahnya suara, atau bahkan lebih jauh masyarakat malas datang ke TPS karena merasa terlalu ribet, dan sebagainya. Belum lagi jika Pilpres harus dilaksanakan 2 putaran yang tentu akan dilakukan pencoblosan ulang, dan lain-lain. Pastinya semua ini merupakan kondisi-kondisi awal yang perlu diperhatikan.

Masih dalam bagan yang sama, maka di bawah kotak *initial conditions* ada kotak proses kolaborasi di sebelah kiri. Hal ini bisa dilakukan baik dengan metode diskusi sebagaimana kegiatan ini sampai aksi-aksi nyata dilapangan. Katakanlah berkenaan dengan

sosialisasi tahapan Pemilu dan Pemilihan, sosialisasi pasangan calon, calon dewan, dan sebagainya, yang sudah barang tentu tidak akan maksimal jika hanya mengandalkan peran KPU. Begitu juga dengan pengawasan yang menjadi ranah Bawaslu. Dengan terbatasnya staf Bawaslu dan rentang proses panjang yang harus dilalui maka akan sangat membutuhkan partisipasi sektor-sektor lain, kemudian dikenal dengan pengawasan partisipatif, termasuk mahasiswa hingga berbagai tokoh yang ada. Tentu hal ini bisa dilakukan secara formal ataupun informal. Yang tidak kalah penting dalam tahap ini adalah pemupukan kepemimpinan bersama diantara pihak-pihak terkait, pengelolaan kolaborasi yang tidak dipusingkan oleh jenjang hirarki siapa berkuasa atas apa, sebagaimana pandangan Agranoff and McGuire (2003), seyogyanya mereka; *should not be confused with managing hierarchies*. Menyatukan beragam kepala dalam satu balutan kolaborasi juga akan melahirkan riak-riak kecil yang oleh Thomson and Perry (2006) membutuhkan pengelolaan konflik antara kepentingan pribadi/golongan dengan kepentingan bersama. Namun demikian, menyamping semuanya bersinergi demi kepentingan yang lebih besar maka seharusnya kekhawatiran tersebut seharusnya tidak ada. Semua akan bersinergi demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas dan secara kuantitas lebih baik.

Selanjutnya, pas disamping kotak proses kolaborasi ada kotak struktur dan *governance* di sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan elemen seperti keanggotaan, tujuan, spesialisasi tugas dan pembagian kerja, aturan dan regulasi, SOP, dan lain-lain. Tentu semua tidak perlu dilakukan secara terlalu kaku, melainkan secara alamiah dapat terbentuk dari pemetaan atas mereka-mereka yang menaruh perhatian terhadap kepemiluan. Begitu juga yang berkenaan dengan peran-peran yang dapat dimainkan, sekali lagi, baik bersifat formal dan informal. Peran-peran formal sudah barang tentu akan dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu dan Pemilihan, yakni KPU dan Bawaslu Probolinggo. Adapun peran-peran informalnya bisa dimainkan oleh sektor lain diluar KPU dan Bawaslu Probolinggo. Sebagai contoh, hal tersebut bisa diisi oleh organisasi yang bergerak di kepemudaan, pengawal ini-itu, LSM, hingga dosen dan mahasiswa dan unsur lainnya sudah jelas menaruh perhatian terhadap hal ini sehingga dalam hal struktur tidak perlu dirisaukan. Sedangkan SOP, regulasi atau aturan yang lain sudah sangat jelas diatur dalam UU Pemilu, UU Pilkada, berikut turunannya, seperti Peraturan KPU, Bawaslu, dan seterusnya.

Selanjutnya adalah *Contingencies and Constraints*, yang berkaitan dengan *types of collaboration* dan *power imbalances*. Tipe kolaborasi lebih kearah koordinasi lintas sektor yang terlibat diluar lembaga penyelenggara dan pengawas, dalam hal ini bisa diwakili oleh akademisi

lintas universitas di seluruh Probolinggo, sesama LSM, karang taruna, kelompok pengajian, sholawatan, dan sebagainya. Bisa pula dilakukan secara menyilang antara akademisi/perguruan tinggi dengan media massa, organisasi keagamaan dengan organisasi pemuda, LSM dengan organisasi ekstra kampus, dan seterusnya. Intinya mereka harus saling berkoordinasi atas aksi-aksi yang dilakukan jangan sampai menyasar pada sasaran yang sama, dan seterusnya. Untuk melihat apa yang dilakukan telah membuahkan hasil, maka hal ini setidaknya bisa diarahkan dalam investasi jangka menengah, sekitar 3 sampai 5 tahun. Karenanya jangan kemudian berkecil hati jika konsepsi ini dilakukan namun hasil pada Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Sebagaimana diungkapkan dimuka, ini sifatnya kontinum atau bersinambung. Namun demikian untuk meraup hasil maksimal, perlu kiranya ditekankan bahwasanya semua ini bersifat pengabdian, artinya secara profit sangat kecil, bahkan tidak ada sama sekali, dan kebanyakannya adalah pihak-pihak yang terlibat tidak jarang mengeluarkan kocek pribadi demi tercapainya cita-cita terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik. Adapun *power imbalances* mengarah pada adanya kekuasaan antara satu elemen dengan elemen lain yang tidak setara. Namun haruslah disadari yang paling utama kekuasaannya tidak lain dan tidak bukan adalah lembaga penyelenggara dan Pengawas Pemilu dan Pemilihan, dalam hal ini KPU dan Bawaslu berposisi sejajar dan lebih tinggi kedudukannya dari Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Terakhir adalah *Outcomes and Accountability*. Yang pertama adalah *public value*. Bromel (2012) memaknai nilai publik sebagai nilai-nilai yang dikehendaki masyarakat dan nilai tambah bagi ruang publik atau *public sphere*. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya literasi politik, partisipasi aktif dalam demokrasi yang semakin baik, representasi rakyat yang lebih memadai, baik diranah eksekutif dan legislatif. Adapun akuntabilitasnya akan bermuara pada pembelajaran baru baik bagi penyelenggara, pengawas, pemilih, yang dipilih serta kemitraan yang senantiasa terjaga antara elemen-elemen yang terlibat baik Ketika hendak menghadapi Pemilu dan Pemilihan ataupun tidak. Karena pasca Pemilu dan Pemilihan usai bukan berarti kolaborasi ini juga usai, melainkan tetap harus bermitra, bersosialisasi, berkoordinasi, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agranoff & McGuire, 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Wisconsin: Georgetown university Press.
- Bryson, John, Barbara C. Crosby, Melissa Middleton Stone. *The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature*. DOI:[10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x)
- Bromell, David. 2012. *Creating Public Value in the Policy Advice Role: A Reflection from the Front Line*. Policy Quarterly – Volume 8, Issue 4 – November 2012.
- Rhodes, R. A. W., and John Wanna. 2007. *The Limits to Public Value, or Rescuing Responsible Government from the Platonic Guardians*. Australian Journal of Public Administration 66, 2007.
- Thomson, Ann Marie and James L. Perry. 2006. *Collaboration Processes: Inside the Black Box*. doi.org/[10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x](https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x)

SURAT TUGAS



UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)**

Jl. Yos Sudarso Pabean Dringu Telp. (0335) 422715, 427923, Fax. (0335) 427923 Probolinggo 67271
Email: lppm@upm.ac.id – Website: <https://lppm.upm.ac.id/>

SURAT TUGAS

Nomor: 820/ST/LPPM/UPM.Pb/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada:

No	NIDN	Nama	Keterangan
1	0701018004	Imam Suchahyo, S.IP., M.AP.	Dosen Universitas Panca Marga

Untuk melakukan tugas Sebagai **Pemateri**, pada kegiatan KPU-Bawaslu Probolinggo *Talk#1*; Menjawab Tantangan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, yang diselenggarakan oleh KPU-Bawaslu Kota Probolinggo, pada tanggal 30 Juni 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Probolinggo

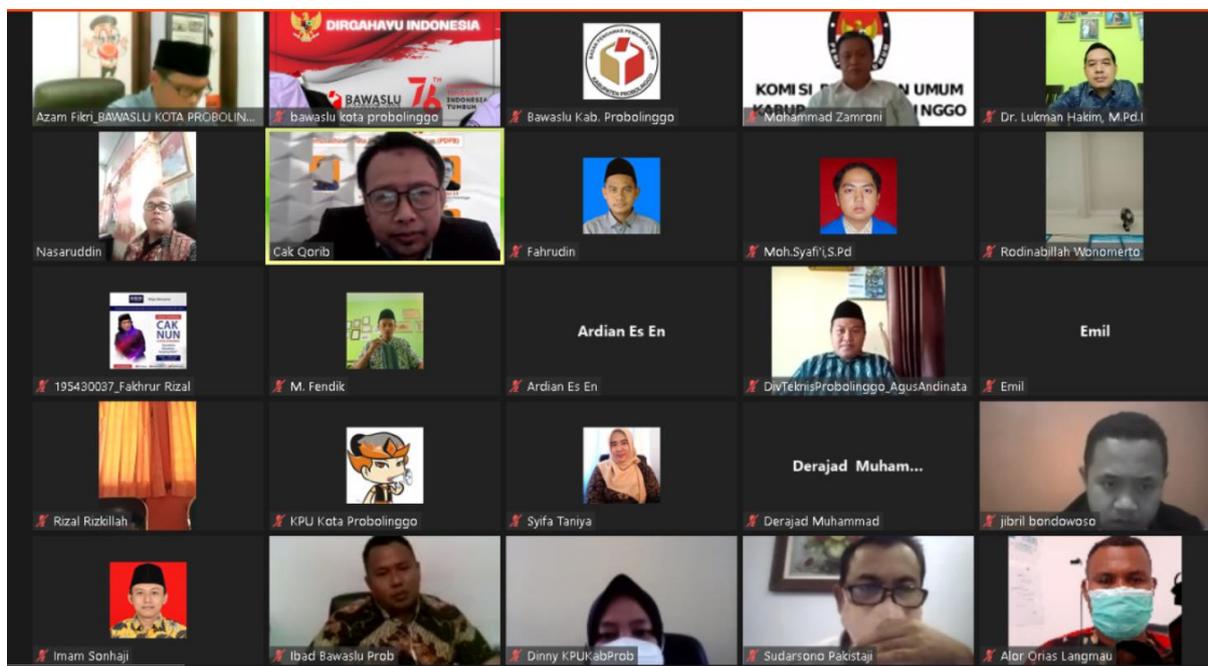
Pada tanggal : 26 Juni 2021



Hermanto, S.E., MM., CRA.

NIDN. 0711056805

DOKUMENTASI





Sertifikat

Nomor : 26 / HM.02-Kt / 3574 / KPU-Kot / VI / 2021

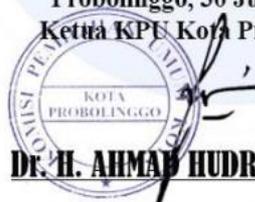
Diberikan Kepada :

IMAM SUCAHYO, S.IP., M.AP

Sebagai
NARASUMBER

Dalam Rangka KPU-Bawaslu Probolinggo Talk #1
"Menjawab Tantangan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024"

Probolinggo, 30 Juni 2021
Ketua KPU Kota Probolinggo



DR. H. AHMAD HUDRI, S.T., M.AP



KPU KOTA PROBOLINGGO | KPU PROBOLINGGO | KPUPROBOLINGGO | <https://www.youtube.com/channel/UC2aWw-wk0t870k1y79Q> | <http://kota-probolinggo.kpu.go.id/> | kpuprobkota@gmail.com